

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN KERUGIAN KEUANGAN DESA DI DESA HANURA KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

Oleh

TESSA VERONIKA PARDOSI

Kerugian Desa mempunyai kaitan dengan praktik tindakan kerugian keuangan yang mengakar dalam perilaku sejumlah aparat dan pejabat. Tindakan kerugian keuangan terjadi karena seorang atau kelompok orang yang memiliki kuasa memanfaatkan jabatan sebagai suatu keistimewaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, kewajiban untuk membentuk suatu kebijakan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam upaya pencegahan tindak kerugian keuangan desa. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah mengenai kebijakan Pemerintah Desa Hanura dalam pencegahan kerugian Keuangan Desa dan menganalisis faktor apa yang menjadi penghambat dalam upaya pencegahan kerugian Keuangan Desa. Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan dan pustaka, dengan memperhatikan peraturan yang mengikat. Studi lapangan dilakukan dengan metode wawancara pihak narasumber. Peraturan perundang-undangan sebagai bahan menganalisis regulasi terkait keuangan negara. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberi pemahaman mendalam mengenai bentuk kebijakan dan faktor penghambatnya. Hasil penelitian di Desa Hanura menunjukkan bahwa penetapan kebijakan telah dirancang sesuai dengan peraturan yang ada, dengan perumusan peraturan desa dan kebijakan lain yang dapat menunjang upaya Pemerintah Desa Hanura. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah faktor penghambat sumber daya manusia aparat desa yang kurang memadai, aspirasi masyarakat yang kurang partisipatif, dan indikasi suap yang terjadi menjadi penghambat segala upaya kebijakan yang dibentuk pemerintah Desa Hanura. Pelatihan dan pengaplikasian sistem keuangan desa secara rutin diperlukan sehingga fungsi pengawasan dari masyarakat dapat berjalan dan meningkatkan sumber daya aparatur desa secara lebih optimal sehingga meningkatkan kualitas pemerintah desa Hanura.

Kata kunci: kebijakan, pemerintah desa, kerugian keuangan desa

ABSTRACT

VILLAGE GOVERNMENT POLICY IN PREVENTING VILLAGE FINANCIAL LOSSES IN HANURA VILLAGE PESAWARAN DISTRICT LAMPUNG PROVINCE

By

TESSA VERONIKA PARDOSI

Village financial losses are linked to deep-rooted corruption practices among a number of officials and civil servants. Corruption occurs when a person or group of people in power use their position to gain personal benefits. Based on Pesawaran Regency Regulation Number 38 of 2016 concerning Guidelines for Controlling Gratuities within the Pesawaran Regency Government, there is an obligation to formulate a policy to carry out supervisory functions in an effort to prevent financial losses in villages. This study raises the problem formulation regarding the Hanura Village Government's policy in preventing village financial losses and analyzes the factors that hinder efforts to prevent village financial losses. This study uses field and literature study methods, with due regard to binding regulations. The field study was conducted using interviews with informants. Laws and regulations were used as material for analyzing regulations related to state finances. Data analysis used a qualitative descriptive approach to provide an in-depth understanding of the form of policy and the factors that hinder it. The results of the study in Hanura Village show that the policy has been designed in accordance with existing regulations, with the formulation of village regulations and other policies that can support the efforts of the Hanura Village Government. However, the major challenges faced are the inhibiting factors of inadequate village officials human resources, lack of community participation, and indications of bribery, which hinder all policy efforts formed by the Hanura Village Government. Training and routine application of the community can run and optimize the village officials resources, thereby improving the quality of the Hanura Government.

Keywords: policy, village government, financial loss to the village